Partai Nasional Indonesia dalam Historiografi Indonesia:

Reinterpretasi Peran dan Warisan Politiknya

Oleh:
Muhammad Farid Wajdi 1), **Syamzan Syukur** 2)

Studi Pascasarjana Program Dirasah Islamiyah Konsentrasi Sejarah Peradaban Islam
UIN Alauddin Makassar
Email: mfarid.wajdi@immimpangkep.ponpes.id 1), syamzan.syukur@uin-alauddin.ac.id 2)

Abstrak

Partai Nasional Indonesia (PNI), yang didirikan pada tahun 1927 di bawah kepemimpinan Soekarno, merupakan salah satu pilar utama dalam pergerakan kemerdekaan serta perkembangan lanskap politik modern Indonesia. Kendati demikian, narasi sejarah mengenai PNI sering kali terjebak dalam simplifikasi historiografis—baik sebagai sekadar kendaraan politik Sukarno pada masa kolonial, maupun sebagai alat mobilisasi massa yang birokratis pada era Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru. Artikel ini bertujuan untuk melakukan reinterpretasi kritis terhadap peran, dinamika internal, serta warisan politik PNI dalam historiografi Indonesia melalui metode sejarah kritis. Studi ini melacak bagaimana representasi PNI mengalami pergeseran makna dari masa ke masa, dipengaruhi oleh kontestasi ideologis dan rezim penguasa yang dominan. Hasil analisis menunjukkan bahwa PNI bukan sekadar organisasi politik statis, melainkan sebuah arena pergulatan ideologis yang mempertemukan sintesis nasionalisme radikal, marhaenisme, serta pragmatisme birokratis. Warisan politik PNI tetap membekas kuat dalam pembentukan identitas nasionalisme sekuler-populis di Indonesia kontemporer. Pada bagian pertama ini, artikel akan menguraikan fondasi konseptual, dinamika historiografis, dan metodologi yang melandasi rekonstruksi kritis sejarah PNI.

Kata Kunci: Partai Nasional Indonesia (PNI), Historiografi Sejarah, Marhaenisme, Nasionalisme, Reinterpretasi Politik.

Abstract

The Indonesian National Party (Partai Nasional Indonesia—PNI), established in 1927 under the leadership of Sukarno, constitutes one of the foundational pillars in both the independence movement and the evolution of Indonesia's modern political landscape. Nonetheless, the historical narrative surrounding the PNI has frequently succumbed to historiographical simplification—rendered either merely as Sukarno's political vehicle during the colonial era, or as a bureaucratic apparatus for mass mobilization under Guided Democracy and the New Order. This article aims to undertake a critical reinterpretation of the PNI's role, internal dynamics, and political legacy within Indonesian historiography utilizing a critical historical method. This study traces how representations of the PNI underwent shifts in meaning over time, conditioned by ideological contestations and dominant ruling regimes. The analysis demonstrates that the PNI was far from

a static political organization; rather, it functioned as an arena of intense ideological struggle that synthesized radical nationalism, Marhaenism, and bureaucratic pragmatism. The political legacy of the PNI remains deeply embedded in the formation of contemporary Indonesia's secular-populist nationalist identity. In this first installment, the article delineates the conceptual foundations, historiographical dynamics, and methodology underpinning the critical reconstruction of the PNI's history.

Keywords: Indonesian National Party (PNI), Historiography, Marhaenism, Nationalism, Political Reinterpretation.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penulisan sejarah (historiografi) suatu bangsa sering kali bukan sekadar rekaman objektif masa lalu, melainkan sebuah medan pertempuran diskursif yang merefleksikan kontestasi kekuasaan pada masa penulisan tersebut dilakukan. Di Indonesia, dinamika historiografi nasional tidak dapat dipisahkan dari pasang-surut kekuasaan politik yang silih berganti memegang kendali atas narasi masa lalu. Salah satu entitas politik yang paling krusial, sekaligus paling kompleks untuk ditempatkan dalam spektrum historiografi tersebut, adalah Partai Nasional Indonesia (PNI). Didirikan di Bandung pada 4 Juli 1927 oleh Sukarno dan para tokoh Perserikatan Nasional Indonesia (yang kemudian berganti nama menjadi Partai Nasional Indonesia pada 1928), partai ini segera menjelma menjadi katalisator utama bagi kristalisasi gagasan kebangsaan yang radikal dan non-kooperatif terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda[1].

Sebelum berdirinya PNI, panggung pergerakan nasional didominasi oleh organisasi-organisasi keagamaan seperti Sarekat Islam, kelompok pemikiran sosialis-komunis (PKI), serta gerakan kultural-edukatif seperti Budi Utomo. Kehadiran PNI membawa angin baru dengan memperkenalkan sintesis ideologi yang tegas: nasionalisme sekuler yang menembus batas-batas primordial kesukuan dan keagamaan, yang kemudian dirumuskan secara lebih spesifik oleh Sukarno sebagai "Marhaenisme"[2]. Di bawah panji Marhaenisme, PNI berhasil memobilisasi

[1] John Ingleson, Jalan ke Pengasingan: Pergerakan Nasionalis Indonesia tahun 1927-1934, terj. FX. Widaryanto (Jakarta: LP3ES, 1983), hlm. 12-15.

[2] Sukarno, Mentjari Bentuk Nasionalisme: Pokok-Pokok Pikiran Sukarno tentang Marhaenisme (Jakarta: Yayasan Bung Karno, 2001), hlm. 45.

kesadaran massa rakyat bawah (kaum marhaen) bahwa kemerdekaan politik (politieke onafhankelijkheid) adalah jembatan emas yang mutlak harus diseberangi sebelum transformasi sosial-ekonomi dapat diwujudkan.

Namun, posisi penting PNI dalam sejarah pergerakan nasional ini tidak serta-merta menghasilkan narasi historiografi yang monolitik atau konsisten. Sepanjang perjalanan sejarah Indonesia merdeka, PNI mengalami fluktuasi peran yang sangat drastis. Pada masa awal kemerdekaan hingga era Demokrasi Parlementer (1950–1959), PNI memosisikan dirinya sebagai "partai pemerintah" (state party) yang dominan, menjadi pemenang Pemilu 1955, dan melahirkan tokoh-tokoh kunci seperti Ali Sastroamidjojo dan Wilopo[3]. Pada era ini, PNI dipandang sebagai representasi utama dari kelas birokrat formal (priyayi) dan penganut nasionalisme sekuler. Namun, memasuki era Demokrasi Terpimpin (1959–1965), orientasi partai ini terbelah secara internal antara faksi kiri yang dipimpin oleh Ali Sastroamidjojo dan Surachman (yang sangat akrab dengan poros Nasakom ciptaan Sukarno) dengan faksi kanan yang lebih konservatif[4].

Kehancuran politik kiri pasca-peristiwa Gerakan 30 September (G30S) pada tahun 1965 membawa implikasi yang sangat destruktif bagi PNI. Di bawah rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto, dilakukan proses desukarnoisasi dan depolitisasi massa secara sistematis. PNI, yang identik dengan figur Sukarno dan Marhaenisme-nya, dipaksa melakukan "purifikasi" internal dari unsur-unsur kiri sebelum akhirnya dipaksa melebur (fusi) ke dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada tahun 1973 bersama partai-partai Kristen dan Katolik[5]. Sejak saat itu, sejarah PNI sengaja dipinggirkan, diredam, atau dikonstruksi ulang dalam historiografi resmi Orde Baru guna melegitimasi stabilitas politik dan pembangunan ekonomi yang didepankan oleh rezim militeristis tersebut.

Ketimpangan dalam historiografi nasional inilah yang memicu kebutuhan mendesak untuk melakukan reinterpretasi. Selama beberapa dekade, sejarawan sering kali melihat PNI hanya melalui dua lensa ekstrem: pertama, romantisasi hagiografis sebagai "partai penolong" yang

[3] Herbert Feith, The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1962), hlm. 348-350..
[4] Rocamora, J. Eliseo, Nationalism in Search of a Coalition: The Democratic Party of Indonesia (PDI) and the Struggle for Power in the New Order (Quezon City: University of the Philippines Press, 1975), hlm. 82.
[5] David Reeve, Golkar: Sejarah Kelompok Fungsional 1957-1993, terj. S. Maimun (Jakarta: Komunitas Bambu, 2013), hlm. 201.

melahirkan kemerdekaan (perspektif pra-1965); atau kedua, reduksi historis yang mengerdilkan peran PNI sebagai sekadar faksi elite oportunis yang gagal membendung radikalisme kiri dan akhirnya diredam demi persatuan nasional (perspektif Orde Baru). Kedua sudut pandang ini mengabaikan dinamika internal PNI yang sangat kaya, pergulatan ideologis para kadernya di tingkat lokal, serta warisan kultural-politik yang sebenarnya tetap hidup di bawah permukaan tanah politik Indonesia, bahkan hingga era Reformasi saat ini[6].

Reinterpretasi sejarah PNI menjadi kian relevan jika kita melihat lanskap politik kontemporer Indonesia. Gagasan tentang nasionalisme sekuler, populisme berbasis massa bawah, serta simbol-simbol "Sukarnoisme" terus diperebutkan dan digunakan oleh berbagai kekuatan politik baru. Pewaris ideologis PNI, yang sebagian besar bertransformasi melalui PDI dan kemudian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), secara konsisten menggunakan narasi historis PNI 1927 sebagai alat legitimasi moral dan politik[7]. Tanpa adanya kajian historiografis yang kritis dan objektif, masyarakat akan terjebak dalam mitologisasi sejarah yang dangkal atau manipulasi politik berbasis memori kolektif yang bias.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mencoba mengisi celah dalam historiografi Indonesia dengan melakukan analisis kritis terhadap perjalanan historis PNI. Penelitian ini tidak hanya akan melihat PNI sebagai struktur organisasi formal, melainkan sebagai sebuah ide, gerakan, dan simbol budaya-politik yang terus bertransformasi. Dengan meneliti dokumen-dokumen primer, memoar tokoh, koran sezaman, serta membandingkan literatur historiografi yang diproduksi pada era yang berbeda, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembacaan baru yang lebih seimbang, dinamis, dan terbebas dari jerat bias ideologis rezim tertentu.

B. Rumusan Masalah

Untuk memberikan arah penelitian yang jelas dan mendalam, rumusan masalah dalam kajian ini dirumuskan sebagai berikut:

---

[6] Gerry van Klinken, Minorities, Modernity and the Emerging Nation: Christians in Indonesia, a Biographical Approach (Leiden: KITLV Press, 2003), hlm. 112.

[7] Angus McIntyre, The Indonesian Presidency: The Shift from Personal toward Constitutional Rule (Lanham: Rowman & Littlefield, 2005), hlm. 143-145.

1. Bagaimanakah dinamika perkembangan ideologi dan orientasi politik Partai Nasional Indonesia (PNI) sejak masa pendiriannya tahun 1927 hingga fase peleburannya (fusi) pada tahun 1973?
2. Bagaimana pergeseran narasi dan representasi Partai Nasional Indonesia (PNI) dikonstruksi dalam historiografi Indonesia dari masa kolonial, Orde Lama, Orde Baru, hingga Era Reformasi?
3. Sejauh mana warisan politik, kultural, dan ideologis PNI memengaruhi dan membentuk karakter nasionalisme sekuler-populis dalam lanskap politik Indonesia kontemporer?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penulisan artikel ilmiah ini adalah:

1. Menganalisis secara kritis dinamika perkembangan internal, kontestasi faksional, dan evolusi ideologis Marhaenisme dalam tubuh PNI sejak masa pergerakan nasional hingga masa fusi partai pada tahun 1973.
2. Memetakan, membandingkan, dan mendekonstruksi bias-bias politik serta ideologis dalam berbagai karya historiografi yang membahas tentang PNI dari berbagai periode kepemimpinan nasional di Indonesia.
3. Mengidentifikasi, menginterpretasi, dan merumuskan kembali signifikansi serta warisan politik jangka panjang dari PNI dalam membentuk struktur kesadaran politik nasionalisme modern di Indonesia saat ini.

D. Manfaat Penulisan

Penulisan artikel ilmiah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata yang terbagi ke dalam dua dimensi utama:

1. Manfaat Teoretis (Akademis)

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah historiografi Indonesia, khususnya dalam studi sejarah sosial-politik dan sejarah pemikiran. Melalui pendekatan dekonstruksi historiografis, penelitian ini menawarkan cara pandang baru yang tidak linier dalam

melihat sejarah kepartaian di Indonesia. Hasil kajian ini dapat menjadi rujukan ilmiah bagi para sejarawan, akademisi, mahasiswa, dan peneliti ilmu politik yang ingin mendalami dinamika nasionalisme Indonesia, evolusi marhaenisme, serta bagaimana ingatan sejarah (historical memory) dikonstruksi dan digunakan sebagai instrumen kekuasaan.

2. Manfaat Praktis

Bagi para pelaku politik praktis, pembuat kebijakan, dan masyarakat sipil, penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang akar historis dari pluralisme politik dan ideologi nasionalisme di Indonesia. Dengan memahami sejarah PNI secara jernih, para aktor politik kontemporer diharapkan dapat mengambil pelajaran berharga (lessons learned) mengenai pengelolaan konflik internal partai, bahaya pragmatisme birokratis yang menjauhkan partai dari basis massanya, serta pentingnya merawat basis ideologi tanpa harus terjebak dalam dogmatisme yang kaku. Selain itu, bagi masyarakat umum, tulisan ini berfungsi sebagai media literasi sejarah kritis agar tidak mudah terprovokasi oleh simplifikasi sejarah yang kerap diproduksi untuk kepentingan elektoral jangka pendek.

II. METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian dan Pendekatan Kualitatif

Kajian sejarah teoretis yang berupaya mendekonstruksi dan mereinterpretasi narasi besar partai politik seperti Partai Nasional Indonesia (PNI) menuntut ketepatan metodologis yang kokoh. Penelitian ini didesain sebagai penelitian kualitatif deskriptif-analitis dengan fokus utama pada studi kepustakaan (library research). Karakteristik mendasar dari penelitian kualitatif—sebagaimana dirumuskan oleh John W. Creswell—adalah penekanannya pada pemaknaan (meaning), konteks, dan pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena sosial-politik yang tidak dapat diukur secara statistik[8]. Dalam konteks sejarah, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk tidak sekadar memaparkan kronologi peristiwa (historical events), melainkan

[8] Taufik Abdullah, Sejarah dan Historiografi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 89-91.

menembus masuk ke dalam relasi kekuasaan, kontestasi ideologi, dan dinamika internal yang melatari lahirnya narasi-narasi sejarah tersebut.

Pilihan terhadap metode kualitatif ini didasarkan pada argumen bahwa historiografi—yakni proses rekonstruksi dan penulisan sejarah—merupakan produk dari konstruksi sosial dan politik yang bersifat subjektif. PNI, sebagai salah satu aktor politik paling dinamis dalam sejarah modern Indonesia, telah digambarkan secara berbeda oleh berbagai rezim penguasa, mulai dari era kolonial Hindia Belanda, era Demokrasi Parlementer, era Demokrasi Terpimpin, era Orde Baru, hingga era Reformasi saat ini[9]. Guna mengurai benang kusut representasi yang bias tersebut, diperlukan pisau analisis kualitatif yang mampu membongkar struktur bahasa, retorika, dan kepentingan politik di balik setiap teks sejarah. Dengan demikian, penelitian ini tidak mengklaim dirinya sebagai pencari "kebenaran mutlak tunggal", melainkan sebuah upaya kritis untuk mereinterpretasi pluralitas makna sejarah PNI dalam diskursus historiografi Indonesia.

Lebih jauh lagi, sifat kualitatif dari penelitian ini dioperasionalkan melalui pendekatan historis kritis. Pendekatan ini memandang teks-teks sejarah bukan sebagai dokumen statis yang bebas nilai (value-free), melainkan sebagai ruang kontestasi di mana kekuasaan beroperasi untuk mengukuhkan hegemoninya. Pendekatan historis dalam studi kepustakaan ini berfokus pada analisis temporal, yakni melacak evolusi pemikiran, perubahan arah politik, serta metamorfosis kelembagaan PNI dalam bentangan waktu dari tahun 1927 hingga fase peleburannya pada tahun 1973, bahkan implikasinya pada era kontemporer[10]. Melalui pendekatan kualitatif-historis ini, kompleksitas pemikiran para tokoh PNI seperti Sukarno, Sartono, Ali Sastroamidjojo, hingga Soewirjo dapat dibedah secara proporsional sesuai dengan konteks zaman yang melingkupinya.

B. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) sebagai Metode Utama

Sebagai sebuah penelitian kepustakaan (*library research*), seluruh aktivitas intelektual dalam kajian ini berpusat pada penelusuran, pembacaan, penganalisisan, dan pengolahan bahan-bahan pustaka. Penelitian kepustakaan bukanlah sekadar langkah awal atau pelengkap dari penelitian lapangan (*field research*), melainkan sebuah metode mandiri yang memiliki validitas ilmiah yang

[9] Bambang Purwanto, Gagalnya Historiografi Indonesiasentris? (Yogyakarta: Ombak, 2006), hlm. 43-47.
[10] Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah, terj. Nugroho Notosusanto (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 32-35.

setara[11]. Hal ini dikarenakan objek penelitian kepustakaan adalah teks, dokumen, dan literatur yang merekam jejak-jejak pemikiran manusia dan peristiwa masa lalu. Mestika Zed menegaskan bahwa penelitian kepustakaan memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian tanpa harus melakukan riset lapangan, dengan keunggulan berupa kedalaman teoretis dan kelengkapan dokumentasi tertulis yang melintasi batas waktu[12].

Dalam merekonstruksi sejarah PNI, metode penelitian kepustakaan menjadi pilihan yang tak terhindarkan dan paling relevan karena beberapa alasan mendasar. Pertama, aktor-aktor utama pendiri PNI 1927 serta para elite penentu kebijakan partai pada era 1950-an dan 1960-an sebagian besar telah wafat. Dengan demikian, memori kolektif, perdebatan ideologis, dan keputusan politik mereka tidak lagi dapat digali melalui metode wawancara langsung (*oral history*), melainkan harus dilacak melalui warisan tertulis mereka berupa memoar, otobiografi, pidato politik, risalah sidang, dan dokumen internal partai.

Kedua, objek kajian penelitian ini adalah "historiografi PNI" itu sendiri, yang berarti subjek analisisnya adalah buku-buku sejarah, artikel jurnal, dokumen kurikulum sekolah, dan narasi-narasi tertulis yang diproduksi oleh para sejarawan profesional maupun sejarawan resmi bentukan pemerintah di masa lampau[13]. Untuk menganalisis bagaimana sejarah PNI ditulis dan diinterpretasikan ulang dari zaman ke zaman, peneliti mutlak harus berhadapan langsung dengan teks-teks historiografis tersebut sebagai data primer. Melalui riset kepustakaan yang ketat, peneliti dapat melacak inkonsistensi narasi, bias ideologis, dan proses sensor sejarah (*historical censorship*) yang terjadi pada masa-masa tertentu, khususnya selama era totalitarian Orde Baru.

C. Sumber Data: Klasifikasi Primer dan Sekunder

Kredibilitas suatu penelitian sejarah sangat bergantung pada klasifikasi dan kritik terhadap sumber data yang digunakan. Dalam penelitian kepustakaan ini, sumber data dikelompokkan ke dalam dua kategori utama, yaitu sumber primer (primary sources) dan sumber sekunder (secondary sources).

---

[11] Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3-5.

[12] Ibid., hlm. 8.

[13] Taufik Abdullah, Sejarah dan Historiografi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 89-91.

1. Sumber Primer

Sumber primer merupakan kesaksian langsung dari pelaku atau saksi mata peristiwa sejarah, atau dokumen asli yang diproduksi sezaman dengan peristiwa yang dikaji[14]. Dalam penelitian ini, sumber primer yang dianalisis meliputi:

- Dokumen Resmi Partai, berupa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PNI, keputusan kongres, manifesto politik, brosur propaganda, serta instruksi-instruksi pengurus besar PNI yang diterbitkan antara tahun 1927 hingga 1973.
- Karya Tulis dan Pidato Tokoh Kunci, berupa Teks Pidato-pidato Soekarno yang monumental, seperti Indonesia Menggugat (1930), Lahirnya Pancasila (1945), serta tulisan-tulisannya mengenai Marhaenisme di koran Fikiran Ra'jat dan Sastroamidjojo's memoirs[15].
- Penerbitan Sezaman, berupa Surat kabar dan majalah yang terbit pada masa pergerakan nasional maupun masa kemerdekaan yang melaporkan aktivitas PNI, seperti Persatoean Indonesia, Pikiran Rakyat, Suluh Indonesia, dan Mimbar Indonesia.

Arsip Kolonial: Dokumen laporan intelijen politik Belanda (Politieke Inlichtingen Dienst atau PID) mengenai aktivitas para pemimpin PNI, keputusan pengadilan kolonial Bandung terhadap tokoh-tokoh PNI pada tahun 1930, serta dokumen pengasingan para tokoh nasionalis ke Boven Digul dan Flores[16].

2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah karya penulisan sejarah yang disusun oleh para peneliti atau sejarawan pasca-peristiwa berlalu, yang didasarkan pada analisis terhadap sumber-sumber primer[17]. Sumber sekunder dalam penelitian ini meliputi:

---

[14] Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah, hlm. 45..

[15] Sukarno, Indonesia Menggugat: Pidato Pembelaan Bung Karno di Depan Pengadilan Kolonial Bandung, 1930 (Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1961); Ali Sastroamidjojo, Tonggak-Tonggak di Perjalananku (Jakarta: Krama Yudha, 1974)..

[16] Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional, Dari Kebangkitan Nasional Sampai Proklamasi Kemerdekaan, Jilid 2 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 176-179.

[17]Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), hlm. 94.

Buku Sejarah dan Biografi: Karya-karya sejarawan terkemuka mengenai pergerakan nasional, politik kepartaian Indonesia, dan biografi tokoh PNI. Buku monumental John Ingleson tentang jalan ke pengasingan, studi Bernhard Dahm mengenai Sukarno dan perjuangan kemerdekaan, serta analisis J. Eliseo Rocamora mengenai transisi PNI menuju era Orde Baru menjadi rujukan sekunder yang krusial[18].

Artikel Jurnal Ilmiah: Jurnal-jurnal sejarah baik nasional maupun internasional yang membahas tentang evolusi nasionalisme Indonesia, perkembangan ideologi Marhaenisme, serta dinamika politik elektoral Pemilu 1955.

Karya Historiografi Resmi: Buku Sejarah Nasional Indonesia (SNI) Jilid VI edisi Orde Baru yang mencerminkan pandangan resmi pemerintah mengenai peran PNI dan proses fusi partai pada tahun 1973[19].

D. Teknik Pengumpulan Data: Heuristik Kepustakaan

Proses pengumpulan data dalam penelitian sejarah dikenal dengan istilah heuristik. Sebagai penelitian kepustakaan, tahapan heuristik dalam riset ini dilakukan melalui penelusuran literatur yang sistematis dan terarah (targeted literature search). Langkah awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi kata kunci (keywords) yang relevan dengan fokus kajian, seperti "Partai Nasional Indonesia", "PNI 1927", "Marhaenisme", "Nasionalisme Sekuler", "Historiografi Sejarah Indonesia", "Desukarnoisasi", dan "Fusi Partai 1973".

Penelusuran sumber fisik dilakukan di beberapa lembaga kearsipan dan perpustakaan bereputasi tinggi yang menyimpan koleksi dokumen sejarah Indonesia abad ke-20. Lembaga-lembaga tersebut antara lain:

---

[18] John Ingleson, Road to Exile: The Indonesian Nationalist Movement 1927-1934 (Singapore: Heinemann, 1979); Bernhard Dahm, Sukarno and the Struggle for Indonesian Independence, terj. Mary F. Somers Heidhues (Ithaca: Cornell University Press, 1969); J. Eliseo Rocamora, Nationalism in Search of a Coalition, hlm. 115..

[19] Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1984).

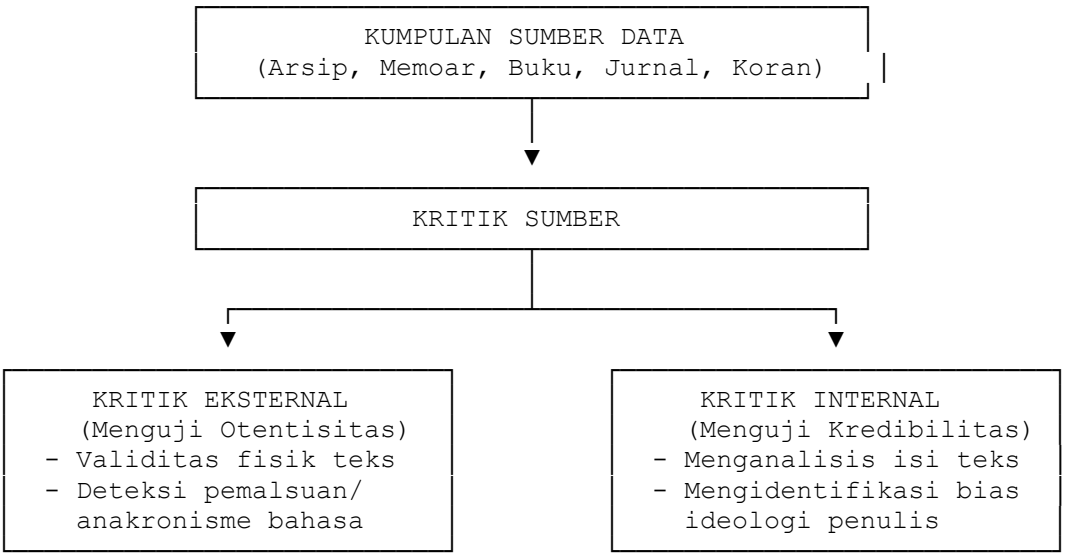
1. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) di Jakarta, khususnya untuk mengakses koleksi mikrofilm surat kabar kuno, majalah sezaman, dan buku-buku langka terbitan pra-kemerdekaan.
2. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), guna melacak arsip-arsip resmi kepartaian, laporan-laporan Kementerian Penerangan era Demokrasi Parlementer, serta dokumen pemilu pertama tahun 1955.
3. Perpustakaan Pusat dan Pusat Studi Sejarah di beberapa universitas terkemuka seperti Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk mengumpulkan skripsi, tesis, disertasi, dan laporan penelitian yang belum dipublikasikan secara luas.

Selain penelusuran fisik, heuristik juga dilakukan secara digital melalui database jurnal ilmiah internasional bereputasi (seperti JSTOR, Taylor & Francis, SpringerLink, dan Google Scholar) untuk melacak kajian-kajian mutakhir dari para Indonesianis Barat mengenai PNI dan dinamika politik Orde Lama-Orde Baru[20]. Seluruh data kepustakaan yang berhasil dikumpulkan kemudian diorganisasikan secara tematis menggunakan aplikasi manajemen referensi (seperti Zotero atau Mendeley) guna memudahkan proses pelacakan silang (cross-referencing) dan sitasi.

E. Teknik Kritik Sumber (Verifikasi)

Data kepustakaan yang telah terkumpul tidak dapat langsung digunakan begitu saja dalam penulisan sejarah sebelum melalui tahapan kritik sumber atau verifikasi. Kritik sumber adalah upaya untuk menguji keaslian (autentisitas) dan keandalan (kredibilitas) dari data yang terkandung di dalam bahan pustaka[21]. Kritik sumber dalam penelitian ini dibagi menjadi dua aspek pokok, yaitu kritik eksternal dan kritik internal.

[20] C.W. Watson, Of Self and Nation: Autobiography and the Representation of Modern Indonesia (Honolulu: University of Hawaii Press, 2000), hlm. 55-58..
[21] Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, hlm. 99-101.



1. Kritik Eksternal (Otentisitas)

Kritik eksternal bertujuan untuk menguji apakah dokumen atau buku yang ditemukan tersebut benar-benar asli, utuh, dan berasal dari zaman yang diklaim oleh teks tersebut[22]. Dalam menganalisis dokumen primer PNI, kritik eksternal dilakukan dengan memeriksa aspek fisik dokumen, seperti jenis kertas, tinta yang digunakan (untuk dokumen cetak asli), tipografi, serta gaya bahasa yang digunakan. Peneliti harus peka terhadap kemungkinan adanya anakronisme istilah—misalnya, jika ada dokumen yang diklaim sebagai terbitan tahun 1928 namun menggunakan ejaan bahasa Indonesia modern (EYD/EBI) atau istilah-istilah politik yang baru populer pasca-kemerdekaan, maka dokumen tersebut patut diragukan otentisitasnya.

2. Kritik Internal (Kredibilitas)

Setelah sebuah sumber dinyatakan otentik melalui kritik eksternal, peneliti melangkah ke kritik internal untuk menguji seberapa jauh isi dari dokumen tersebut dapat dipercaya (*kredibel*). Aspek ini sangat krusial dalam penelitian ini karena sifat penulisan sejarah PNI yang sangat sarat dengan kepentingan politik penguasa[23].

Kritik internal dilakukan dengan cara:

[22] Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah, hlm. 72..
[23] Bambang Purwanto, Gagalnya Historiografi Indonesiasentris?, hlm. 88.

a. Analisis Latar Belakang Penulis

Meneliti siapa yang menulis teks tersebut, apa posisi politiknya pada saat menulis, dan apa kepentingannya. Sebagai contoh, pidato-pidato Sukarno mengenai PNI tentu ditulis dari perspektif subjektifnya sebagai pendiri dan ideolog utama partai, sehingga perlu diimbangi dengan laporan-laporan dari pihak oposisi atau dokumen intelijen kolonial Belanda untuk mendapatkan gambaran yang lebih objektif.

b. Kritik Bias Historiografis

Menganalisis buku-buku sejarah era Orde Baru (seperti SNI VI) secara kritis. Peneliti mengidentifikasi bagian-bagian di mana narasi mengenai peran PNI dalam pergerakan kemerdekaan dikecilkan atau diabaikan demi menonjolkan peran militer dalam perjuangan kemerdekaan.

c. Verifikasi Silang (Triangulasi Sumber)

Membandingkan suatu pernyataan atau data sejarah dari satu sumber dengan sumber-sumber lain yang independen[24]. Jika sebuah surat kabar PNI mengklaim jumlah anggota mereka mencapai ratusan ribu pada tahun 1930, angka tersebut harus disilangkan dengan data resmi dari laporan rahasia Gubernur Jenderal Hindia Belanda kepada Kementerian Jajahan (Koloniaal Verslag) pada tahun yang sama guna mendapatkan estimasi jumlah yang lebih realistis.

F. Analisis Data dan Interpretasi Historiografis

Setelah data kepustakaan melewati proses verifikasi yang ketat, tahapan berikutnya adalah melakukan interpretasi atau penafsiran sejarah. Tahap analisis data ini tidak sekadar merangkum isi buku atau dokumen yang dibaca, melainkan menyusun potongan-potongan fakta sejarah tersebut menjadi sebuah sintesis naratif yang logis, kritis, dan bermakna[25].

[24] Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 330.
[25] Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, hlm. 104-106..

Dalam menganalisis teks-teks historiografi PNI, penelitian ini menerapkan teknik analisis wacana kritis (critical discourse analysis) secara terbatas. Pendekatan ini melihat bahasa dan teks sejarah sebagai instrumen kekuasaan[26]. Analisis data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (Klasifikasi Tematis)

Mengelompokkan data kepustakaan yang telah diverifikasi ke dalam kluster-kluster tematis yang sesuai dengan rumusan masalah, seperti: (a) Perkembangan Ideologi PNI; (b) Representasi PNI dalam Historiografi Orde Baru; (c) Dinamika Internal dan Fusi 1973; dan (d) Warisan Politik PNI di Era Reformasi.

2. Analisis Komparatif-Historiografis

Membandingkan bagaimana teks-teks sejarah dari tiga rezim politik yang berbeda (Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi) mengonstruksi peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah PNI. Melalui perbandingan ini, akan terlihat dengan jelas pergeseran narasi dari heroisme perjuangan radikal menjadi narasi tentang bahaya ketidakstabilan politik dan pentingnya fusi kepartaian[27].

3. Sintesis Historis (Eksplanasi)

Menghubungkan fakta-fakta sejarah yang telah dianalisis dengan teori-teori sosiologi politik dan sejarah pemikiran. Peneliti menggunakan konsep hegemoni budaya dari Antonio Gramsci dan konsep diskursus dari Michel Foucault untuk menjelaskan bagaimana kekuasaan negara mampu mendominasi dan mengendalikan cara masyarakat mengingat sejarah PNI[28]. Melalui sintesis ini, reinterpretasi peran dan warisan politik PNI dapat dirumuskan secara komprehensif, tidak hanya sebagai catatan masa lampau melainkan sebagai bagian penting yang membentuk lanskap politik masa kini.

---

[26] [Norman Fairclough, Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research (London: Routledge, 2003), hlm. 21-24.

[27] Taufik Abdullah, Sejarah dan Historiografi, hlm. 142..

[28] Antonio Gramsci, Selections from the Prison Notebooks, terj. Quintin Hoare dan Geoffrey Nowell Smith (London: Lawrence & Wishart, 1971); Michel Foucault, The Archaeology of Knowledge, terj. A.M. Sheridan Smith (London: Routledge, 2002)..

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dinamika Ideologi dan Pragmatisme Kelembagaan PNI (1927–1973)

Evolusi internal Partai Nasional Indonesia (PNI) menyajikan potret pergulatan yang tiada henti antara komitmen ideologis yang radikal-populis dan tuntutan pragmatisme politik kelembagaan. Sejak didirikan pada tahun 1927, PNI mengusung platform nasionalisme sekuler radikal yang menolak mentah-mentah kerja sama (*non-kooperasi*) dengan administrasi kolonial Hindia Belanda[29]. Fondasi intelektual ini digagas oleh Sukarno muda melalui rumusan Marhaenisme—sebuah sintesis ideologis yang mencoba mengadaptasi teori-teori Marxisme ke dalam realitas sosio-historis masyarakat agraris Nusantara yang didominasi oleh petani gurem, buruh kecil, dan pedagang tradisional yang memiliki alat produksi sendiri namun tetap miskin akibat eksploitasi kapitalisme kolonial[30].

Namun, radikalisme fase Bandung ini segera menemui ujian berat ketika pemerintah kolonial melakukan tindakan represif berupa penangkapan para pemimpin partai pada Desember 1929 dan pelarangan aktivitas politik PNI pada tahun 1931[31]. Pembubaran PNI oleh Sartono (yang kemudian mendirikan Partindo) serta penolakan faksi Hatta-Sjahrir yang mendirikan PNI Baru (*Pendidikan Nasional Indonesia*) mencerminkan keterbelahan awal yang bersifat taktis-metodologis: apakah perjuangan nasional harus digerakkan melalui agitasi massa yang karismatik atau melalui kaderisasi intelektual yang sistematis[32].

Pasca-kemerdekaan, ketika PNI didirikan kembali pada akhir tahun 1945 dan berkembang menjadi partai pemenang Pemilu 1955, orientasi partai mengalami pergeseran radikal dari partai pergerakan masa kolonial menjadi partai penguasa (*state party* atau *ruling party*). PNI bertransformasi menjadi wadah bagi birokrasi sipil, kaum *priyayi* baru, dan elite administratif

[29] John Ingleson, Road to Exile: The Indonesian Nationalist Movement 1927-1934 (Singapore: Heinemann, 1979), hlm. 48-52.

[30] Sukarno, Mentjari Bentuk Nasionalisme: Pokok-Pokok Pikiran Sukarno tentang Marhaenisme (Jakarta: Yayasan Bung Karno, 2001), hlm. 68.

[31] Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional, Jilid 2 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 182-185.

[32] John D. Legge, Sukarno: Sebuah Biografi Politik, terj. (Jakarta: Sinar Harapan, 1985), hlm. 114.

Indonesia[33]. Transformasi sosiologis ini melahirkan ketegangan laten di dalam tubuh partai. Di satu sisi, PNI dituntut mempertahankan identitas Marhaenisme-nya sebagai pembela rakyat kecil, namun di sisi lain, kepemimpinan partai didominasi oleh elite perkotaan dan birokrat pragmatis yang lebih berkepentingan mempertahankan stabilitas kekuasaan ketimbang melakukan perubahan struktural yang radikal.

Ketegangan ini mencapai kulminasinya pada era Demokrasi Terpimpin (1959–1965). Sukarno, yang kala itu bertindak sebagai Presiden sekaligus "Bapak Marhaenisme," mendorong PNI untuk mengadopsi garis kiri yang lebih tegas guna mendukung poros revolusioner Nasakom (Nasionalisme, Agama, Komunisme)[34]. Hal ini memicu perpecahan faksional yang sangat tajam di dalam tubuh PNI, yaitu Faksi Sayap Kiri dan Faksi Sayap Kanan.

Faksi Sayap Kiri

Dipimpin oleh Ali Sastroamidjojo dan Sekretaris Jenderal Surachman. Faksi ini merumuskan ulang Marhaenisme sebagai "Marhaenisme Gadungan" versus "Marhaenisme Asli" (yang diidentikkan dengan Marxisme yang diterapkan di Indonesia) serta mendirikan organisasi sayap pemuda, buruh, dan kebudayaan (seperti LKN—Lembaga Kebudayaan Nasional) yang bergerak semakin agresif ke kiri[35].

Faksi Sayap Kanan (Konservatif)

Dipimpin oleh Osa Maliki dan Usep Ranawidjaja. Faksi ini menolak kedekatan dengan PKI (Partai Komunis Indonesia), menentang radikalisasi land reform yang didukung faksi kiri, dan berupaya mempertahankan kedekatan dengan militer (TNI-AD) sebagai pengimbang kekuatan kiri[36].

Pergolakan ini membuktikan bahwa PNI pada dekade 1960-an bukanlah organisasi yang solid, melainkan sebuah arena pertarungan ideologi nasional yang sangat rapuh. Ketika peristiwa G30S

---

[33] Herbert Feith, The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1962), hlm. 358.

[34] J. Eliseo Rocamora, Nationalism in Search of a Coalition: The Democratic Party of Indonesia (PDI) and the Struggle for Power in the New Order (Quezon City: University of the Philippines Press, 1975), hlm. 45-48.

[35] Ibid., hlm. 52.

[36] Bernhard Dahm, Sukarno and the Struggle for Indonesian Independence, terj. Mary F. Somers Heidhues (Ithaca: Cornell University Press, 1969), hlm. 210.

meletus pada tahun 1965 dan diikuti oleh pembersihan massal elemen-elemen kiri oleh militer, faksi kiri PNI hancur lebur. Di bawah tekanan militer, faksi Osa-Usep mengambil alih kepemimpinan partai melalui Kongres PNI di Bandung (1966), melarang Marhaenisme kiri, dan melakukan pembersihan internal yang melemahkan basis massa partai di tingkat akar rumput secara permanen[37]. PNI yang telah dikebiri ini akhirnya kehilangan kemandirian politiknya dan dipaksa melebur (fusi) ke dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada Januari 1973[38].

B. Representasi PNI dalam Tiga Rezim Historiografi

Proses penulisan sejarah PNI di Indonesia merefleksikan bagaimana memori kolektif sebuah bangsa dimanipulasi, didekonstruksi, dan dikonstruksi ulang demi melayani kepentingan politik rezim yang berkuasa. Berdasarkan analisis pustaka, representasi PNI dalam historiografi Indonesia dapat dipetakan ke dalam tiga fase dominan yang saling bertolak belakang.

Dimensi Analisis	**Historiografi Era Sukarno (Pra-1965)**	**Historiografi Era Orde Baru (1966–1998)**	**Historiografi Era Reformasi (Pasca-1998)**
Karakter Utama	Hagiografis & Revolusioner	Depolitisasi & Reduksionis	Kritis & Reinterpretatif
Status Sukarno	Pahlawan Tunggal & Pembebas Nasional	Tokoh Historis dengan Kelemahan Fatal	Tokoh Humanis dengan Kompleksitas Ideologis
Posisi Marhaenisme	Ideologi Pembebasan Nasional	Ideologi Terlarang/Afiliasi Komunisme	Objek Studi Akademis & Simbol Identitas
Fokus Narasi	Radikalisme non-kooperatif terhadap kolonial	Kegagalan sistem kepartaian & fusi partai	Kontestasi faksi lokal & resistensi akar rumput

1. Historiografi Era Sukarno: Romantisasi Revolusioner

Pada masa kejayaan Demokrasi Terpimpin, narasi sejarah mengenai PNI 1927 diproduksi sebagai kitab suci gerakan nasionalis radikal. PNI digambarkan sebagai poros tunggal yang berhasil

[37] Harold Crouch, The Army and Politics in Indonesia (Ithaca: Cornell University Press, 1978),
[38] David Reeve, Golkar: Sejarah Kelompok Fungsional 1957-1993, terj. S. Maimun (Jakarta: Komunitas Bambu, 2013), hlm. 204.

menyatukan sentimen kebangsaan yang terserak dan mengarahkannya menuju konfrontasi langsung dengan imperialisme barat[39]. Sejarah PNI ditulis dengan nada hagiografis (mengagungkan tokoh secara berlebihan) yang berpusat pada kepemimpinan karismatik Sukarno. Karya-karya sejarah pada masa ini mengabaikan peran faksi-faksi moderat di dalam PNI dan menyembunyikan kenyataan bahwa taktik non-kooperasi PNI sempat memicu kecemasan di kalangan elite nasionalis yang lebih memilih jalur diplomasi[40]. Marhaenisme diposisikan sebagai satu-satunya filsafat perjuangan yang absah bagi bangsa Indonesia, sementara sejarah partai-partai lain diredusir atau ditempatkan sebagai subordinat dari perjuangan nasionalis sekuler yang dipimpin PNI.

2. Historiografi Era Orde Baru: Depolitisasi dan Marjinalisasi

Setelah jatuhnya Sukarno, rezim Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto menerapkan kebijakan "Desukarnoisasi" yang sistematis, termasuk dalam penulisan sejarah nasional[41]. Dalam buku Sejarah Nasional Indonesia (SNI) Jilid VI yang menjadi rujukan kurikulum sekolah nasional, peran PNI dalam pergerakan kemerdekaan secara drastis diredusir. Narasi sejarah digeser dari "perjuangan politik massa" menuju "perjuangan bersenjata militer"[42].

PNI era 1950-an digambarkan sebagai simbol kegagalan sistem kepartaian sipil yang korup, tidak stabil, dan mementingkan kelompok sendiri ketimbang persatuan bangsa[43]. Konflik internal PNI faksi kiri (Ali-Surachman) dieksploitasi dalam narasi sejarah resmi untuk mengesankan bahwa PNI telah disusupi oleh Anasir-anasir komunis.

Marhaenisme dilarang untuk didiskusikan di ruang publik atau digambarkan secara negatif sebagai konsep yang identik dengan komunisme terselubung. Melalui konstruksi sejarah ini, Orde Baru

---

[39] Muhammad Yamin, 600 Tahun Sang Merah Putih (Jakarta: Siguntang, 1954), hlm.112

[40] Bambang Purwanto, Gagalnya Historiografi Indonesiasentris? (Yogyakarta: Ombak, 2006), hlm. 92.

[41] Gerry van Klinken, Minorities, Modernity and the Emerging Nation: Christians in Indonesia, a Biographical Approach (Leiden: KITLV Press, 2003), hlm. 134.

[42] Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 245-248.

[43] David Reeve, Golkar: Sejarah Kelompok Fungsional 1957-1993, hlm. 215.

berhasil menjustifikasi depolitisasi rakyat (konsep masses floating) dan pemaksaan fusi partai tahun 1973 sebagai langkah penyelamatan nasional yang mutlak[44].

3. Historiografi Era Reformasi: Dekonstruksi dan Reinterpretasi Kritis

Kejatuhan rezim Orde Baru pada tahun 1998 membuka bendungan sensor sejarah, memungkinkan para sejarawan melakukan dekonstruksi terhadap narasi-narasi sejarah tunggal bentukan militer. Historiografi era Reformasi melihat PNI dengan kacamata yang jauh lebih kritis, seimbang, dan bebas dari beban ideologis penguasa[45].

Studi-studi mutakhir tidak lagi melihat PNI sebagai sekadar alat politik Sukarno, melainkan sebagai sebuah institusi sosial-politik yang sangat kompleks. Sejarawan mulai meneliti dinamika politik lokal PNI di luar Jawa (seperti di Bali, Sumatra Utara, dan Sulawesi Utara) yang sering kali memiliki logika politik yang berbeda dengan Jakarta[46]. Selain itu, fusi partai 1973 kini tidak lagi direpresentasikan sebagai konsensus sukarela demi persatuan bangsa, melainkan didekonstruksi sebagai bentuk represi politik Orde Baru untuk mengamankan dominasi mutlak Golkar[47].

C. Warisan Politik dan Kultural PNI dalam Politik Kontemporer

Meskipun secara institusional PNI telah melebur ke dalam PDI pada tahun 1973 dan tidak lagi eksis dalam bentuk aslinya pasca-Pemilu 1999 (upaya menghidupkan kembali PNI melalui berbagai faksi partai baru sebagian besar menemui kegagalan elektoral), warisan politik dan kultural PNI tetap hidup dan menjadi salah satu kekuatan utama yang membentuk konfigurasi politik Indonesia kontemporer.

Warisan terbesar PNI dapat dilacak pada pembentukan identitas politik nasionalis-sekuler (atau sering disebut kelompok kebangsaan) yang secara konsisten menjadi pengimbang kekuatan politik berbasis Islam di Indonesia[48]. Pola pembelahan sosiologis (cleavage) antara kelompok abangan/nasionalis sekuler dengan kelompok santri/Islam politik, yang pertama kali diidentifikasi

---

[44] Harold Crouch, The Army and Politics in Indonesia, hlm. 220.
[45] Bambang Purwanto, Gagalnya Historiografi Indonesiasentris?, hlm. 104-107.
[46] Gerry van Klinken, Minorities, Modernity and the Emerging Nation, hlm. 142.
[47] Angus McIntyre, The Indonesian Presidency: The Shift from Personal toward Constitutional Rule (Lanham: Rowman & Littlefield, 2005), hlm. 156-159.
[48] Leo Suryadinata, Elections and Politics in Indonesia (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2002), hlm. 82-85.

secara akademis oleh Clifford Geertz pada dekade 1950-an, terbukti masih sangat relevan hingga hari ini[49]. PNI bertindak sebagai jangkar historis bagi pemeliharaan kultur politik nasionalis sekuler tersebut.

Secara kelembagaan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri merupakan pewaris ideologis dan kultural langsung dari trah PNI 1927[50]. PDI-P secara sadar mereproduksi simbol-simbol historis PNI, mulai dari penggunaan warna merah, lambang kepala banteng (yang dimodifikasi dari simbol banteng moncong putih PNI), hingga retorika Marhaenisme yang dikemas ulang sebagai komitmen terhadap "wong cilik"[51].

Penggunaan memori sejarah PNI ini bukan sekadar romantisasi masa lalu, melainkan instrumen legitimasi moral yang sangat efektif bagi PDI-P untuk membangun loyalitas pemilih tradisional (traditional voters) lintas generasi, khususnya di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan daerah-daerah non-Muslim lainnya[52]. Dengan memosisikan diri sebagai penjaga warisan Sukarno dan PNI, partai-partai nasionalis sekuler kontemporer berhasil mempertahankan narasi bahwa mereka adalah benteng utama pertahanan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari ancaman disintegrasi bangsa dan radikalisme agama.

Namun, reaktualisasi warisan PNI dalam politik kontemporer juga menghadapi tantangan serius berupa gejala "neo-pragmatisme". Di tengah sistem pemilu langsung yang sangat padat modal, partai-partai nasionalis sekuler sering kali terjebak dalam pragmatisme pencarian kekuasaan yang mengorbankan komitmen ideologis Marhaenisme-nya[53].

Perlindungan terhadap kelas pekerja, buruh, dan petani (wong cilik) yang dahulu menjadi inti perjuangan PNI 1927 kerap kali tersisih oleh kebijakan-kebijakan pembangunan yang ramah pasar (market-friendly) dan aliansi politik oportunistik dengan kekuatan oligarki keuangan. Di sinilah letak pentingnya reinterpretasi sejarah: sebagai pengingat kritis bahwa warisan politik sejati dari

---

[49] Clifford Geertz, The Religion of Java (Glencoe: The Free Press, 1960), hlm. 355-360.

[50] Angus McIntyre, The Indonesian Presidency, hlm. 162.

[51] Marcus Mietzner, Military Politics, Islam, and the State in Indonesia: From Sarwo Edhie to Wiranto (Singapore: ISEAS, 2009), hlm. 118-120.

[52] Leo Suryadinata, Elections and Politics in Indonesia, hlm. 91.

[53] Richard Robison dan Vedi R. Hadiz, Reorganising Power in Indonesia: The Sociology of Oligarchy in an Age of Markets (London: RoutledgeCurzon, 2004), hlm. 222-225.

PNI bukanlah simbol banteng atau jargon populismenya, melainkan konsistensi keberpihakan struktural terhadap rakyat yang termarjinalkan oleh sistem ekonomi dunia.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Melalui rekonstruksi kritis terhadap sejarah dan penulisan sejarah (historiografi) Partai Nasional Indonesia (PNI) sejak masa pendiriannya pada tahun 1927 hingga fase peleburannya pada tahun 1973, kajian ini berhasil merumuskan beberapa kesimpulan mendasar:

Dinamika Ideologis dan Pragmatisme Politik: PNI pada hakikatnya bukanlah sebuah organisasi politik yang monolitik dan statis, melainkan sebuah arena pergulatan ideologis yang sangat dinamis. Lahir dari sintesis nasionalisme radikal-populis dan Marhaenisme gagasan Sukarno pada era kolonial, PNI pasca-kemerdekaan bertransformasi menjadi wadah bagi birokrasi sipil (state party) yang cenderung pragmatis. Polarisasi tajam antara faksi kiri (Ali-Surachman) yang condong pada revolusioner-Nasakom dengan faksi kanan (Osa-Usep) yang defensif-konservatif pada era Demokrasi Terpimpin membuktikan kerapuhan internal partai akibat tarikan antara idealisme ideologi dan pragmatisme kekuasaan. Kerapuhan inilah yang akhirnya memudahkan militer melakukan kooptasi dan pembersihan internal pasca-G30S 1965, yang berujung pada fusi paksa ke dalam PDI pada tahun 1973.

Pergeseran Narasi Historiografis Lintas Rezim: Penulisan sejarah mengenai PNI mengalami metamorfosis dramatis yang dikendalikan oleh kepentingan legitimasi rezim penguasa. Pada era Orde Lama (Sukarno), historiografi PNI dikonstruksi secara hagiografis-revolusioner, memosisikan PNI dan Sukarno sebagai poros tunggal pembebasan nasional. Sebaliknya, pada era Orde Baru (Soeharto), terjadi proses desukarnoisasi dan depolitisasi di mana peran PNI dalam pergerakan nasional secara drastis diredusir demi menonjolkan peran militer, sementara kiprahnya pada era 1950-an diposisikan sebagai representasi kegagalan demokrasi sipil. Baru pada era Reformasi, iklim akademik yang bebas sensor memungkinkan dekonstruksi narasi tunggal tersebut, melahirkan interpretasi sejarah PNI yang lebih seimbang, kritis, serta sensitif terhadap dinamika politik faksi lokal dan resistensi di tingkat akar rumput.

Warisan Politik Kontemporer: Meskipun PNI secara formal-institusional telah tiada, warisan ideologis dan kulturalnya tetap membekas kuat dalam lanskap politik Indonesia modern. PNI bertindak sebagai peletak dasar sosiologis bagi kultur politik nasionalis-sekuler (kebangsaan) yang menjadi pengimbang utama kelompok Islam politik. Secara kelembagaan, memori historis, simbol, dan basis massa tradisional PNI diwarisi secara langsung oleh PDI-P yang mereproduksi jargon pembela "wong cilik" sebagai alat legitimasi politik elektoral. Namun, reaktualisasi warisan ini di era kontemporer menghadapi tantangan berat berupa gejala neo-pragmatisme politik yang kerap mengorbankan keberpihakan struktural Marhaenisme demi kepentingan oligarki modal.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan di atas, diajukan beberapa saran akademis dan praktis sebagai berikut:

1. Saran Akademis (Penelitian Selanjutnya)

a. Perluasan Kajian Historiografi Lokal

Sebagian besar studi sejarah mengenai PNI masih bersifat Jakarta-sentris atau Jawa-sentris. Peneliti sejarah masa depan disarankan untuk melakukan eksplorasi mendalam terhadap arsip-arsip daerah guna melacak dinamika PNI di luar Jawa (seperti Sumatra Utara, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi Utara). Hal ini krusial untuk melihat bagaimana Marhaenisme diterjemahkan dan diadaptasi di tengah masyarakat adat dan struktur sosial non-Jawa.

b. Studi Komparatif Gerakan Nasionalis

Perlu dilakukan kajian komparatif yang lebih mendalam antara PNI dengan gerakan nasionalis di negara-negara Asia Tenggara lainnya pada paruh pertama abad ke-20 (seperti Nacionalista Party di Filipina atau Thakin Movement di Burma) untuk mendapatkan perspektif makro mengenai pola perkembangan nasionalisme pasca-kolonial.

2. Saran Praktis

a. Merawat Literasi Sejarah Kritis

Institusi pendidikan dan sejarawan profesional perlu terus menggalakkan penulisan sejarah yang kritis dan objektif, terbebas dari jerat hagiografi (pemujaan tokoh) maupun stigmatisasi politik masa lalu. Pemahaman sejarah kepartaian yang jernih akan membantu generasi muda memahami akar pluralisme ideologi bangsa secara dewasa.

b. Reaktualisasi Ideologi yang Substansial

Bagi partai-partai politik kontemporer yang mengklaim diri sebagai pewaris ajaran Sukarno atau nasionalisme PNI, warisan sejarah tidak boleh sekadar dijadikan komoditas visual (simbol banteng, warna merah, foto Sukarno) untuk meraup suara dalam pemilu. Reaktualisasi Marhaenisme harus diwujudkan dalam kebijakan nyata yang berpihak secara struktural pada pemberdayaan petani, buruh, dan masyarakat miskin kota di tengah gempuran kapitalisme global.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Taufik. Sejarah dan Historiografi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Creswell, John W. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. 4th ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014.

Crouch, Harold. The Army and Politics in Indonesia. Ithaca: Cornell University Press, 1978.

Dahm, Bernhard. Sukarno and the Struggle for Indonesian Independence. Diterjemahkan oleh Mary F. Somers Heidhues. Ithaca: Cornell University Press, 1969.

Fairclough, Norman. Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research. London: Routledge, 2003.

Feith, Herbert. The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia. Ithaca, New York: Cornell University Press, 1962.

Foucault, Michel. The Archaeology of Knowledge. Diterjemahkan oleh A.M. Sheridan Smith. London: Routledge, 2002.

Geertz, Clifford. The Religion of Java. Glencoe: The Free Press, 1960.

Gottschalk, Louis. Mengerti Sejarah. Diterjemahkan oleh Nugroho Notosusanto. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

Gramsci, Antonio. Selections from the Prison Notebooks. Diterjemahkan oleh Quintin Hoare dan Geoffrey Nowell Smith. London: Lawrence & Wishart, 1971.

Ingleson, John. Road to Exile: The Indonesian Nationalist Movement 1927-1934. Singapore: Heinemann, 1979.

Ingleson, John. Jalan ke Pengasingan: Pergerakan Nasionalis Indonesia tahun 1927-1934. Diterjemahkan oleh FX. Widaryanto. Jakarta: LP3ES, 1983.

Kartodirdjo, Sartono. Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional, Dari Kebangkitan Nasional Sampai Proklamasi Kemerdekaan. Jilid 2. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Klinken, Gerry van. Minorities, Modernity and the Emerging Nation: Christians in Indonesia, a Biographical Approach. Leiden: KITLV Press, 2003.

Kuntowijoyo. Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005.

Legge, John D. Sukarno: Sebuah Biografi Politik. Diterjemahkan oleh tim Sinar Harapan. Jakarta: Sinar Harapan, 1985.

McIntyre, Angus. The Indonesian Presidency: The Shift from Personal toward Constitutional Rule. Lanham: Rowman & Littlefield, 2005.

Mietzner, Marcus. Military Politics, Islam, and the State in Indonesia: From Sarwo Edhie to Wiranto. Singapore: ISEAS, 2009.

Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.

Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. Sejarah Nasional Indonesia VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.

Purwanto, Bambang. Gagalnya Historiografi Indonesiasentris? Yogyakarta: Ombak, 2006.

Reeve, David. Golkar: Sejarah Kelompok Fungsional 1957-1993. Diterjemahkan oleh S. Maimun. Jakarta: Komunitas Bambu, 2013.

Robison, Richard dan Vedi R. Hadiz. Reorganising Power in Indonesia: The Sociology of Oligarchy in an Age of Markets. London: RoutledgeCurzon, 2004.

Rocamora, J. Eliseo. Nationalism in Search of a Coalition: The Democratic Party of Indonesia (PDI) and the Struggle for Power in the New Order. Quezon City: University of the Philippines Press, 1975.

Sastroamidjojo, Ali. Tonggak-Tonggak di Perjalananku. Jakarta: Krama Yudha, 1974.

Sukarno. Indonesia Menggugat: Pidato Pembelaan Bung Karno di Depan Pengadilan Kolonial Bandung, 1930. Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1961.

Sukarno. Mentjari Bentuk Nasionalisme: Pokok-Pokok Pikiran Sukarno tentang Marhaenisme. Jakarta: Yayasan Bung Karno, 2001.

Suryadinata, Leo. Elections and Politics in Indonesia. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2002.

Watson, C.W. Of Self and Nation: Autobiography and the Representation of Modern Indonesia. Honolulu: University of Hawaii Press, 2000.

Yamin, Muhammad. 600 Tahun Sang Merah Putih. Jakarta: Siguntang, 1954.

Zed, Mestika. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

(*Penulis: 1) **Muhammad Farid Wajdi**, Mahasiswa Studi Pascasarjana (S2) Non Reguler Program Dirasah Islamiyah Konsentrasi Sejarah Peradaban Islam UIN Alauddin Makassar. 2) **Prof Dr Syamzan Syukur, M.Ag.**, Guru Besar Tetap UIN Alauddin Makassar, Mengajar Mata Kuliah Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia di Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.